

# ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN KONSUMSI PANGAN PENDUDUK KABUPATEN BOGOR



*Disusun Oleh*

**YAYAT HERYATNO, SP, MPS**

**DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN GIZI MANUSIA - IPB UNIVERSITY  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi penduduk, baik jumlah maupun mutunya, agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Program peningkatan ketahanan pangan, khususnya dalam upaya penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan salahsatu prioritas utama pembangunan di Indonesia.

Situasi konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari ukuran kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan capaian kinerja pembangunan ketahanan pangan, khususnya bidang konsumsi pangan. Dalam rangka mendapatkan gambaran kinerja tersebut, maka penyusun sebagai tenaga pendamping Ahli Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bogor secara khusus telah melaksanakan kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian Tingkat Kecukupan Energi (TKE), Tingkat Kecukupan Protein (TKP), dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada dinas dan instansi terkait pembangunan bidang ketahanan pangan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, serta semua pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan kajian ini, khususnya Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional.

Bogor, Juni 2026

Penyusun

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi manusia karena pangan adalah kebutuhan dasar hayati manusia yang paling utama. Selain itu juga pangan memegang peranan yang paling penting dalam pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif. Mengingat pentingnya hal tersebut, setiap negara memprioritaskan pembangunan di bidang ketahanan pangan sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, perkembangan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis situasi konsumsi pangan sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut di atas, pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bogor secara khusus telah melaksanakan kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayah menuju pencapaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan.

Tujuan umum kajian ini adalah menganalisis Pola Pangan Harapan konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk: 1). Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH); dan 2). Menganalisis

estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.

Data pokok yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik, yaitu data konsumsi pangan penduduk hasil Susenas serta data jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2024. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data Susenas yang dikembangkan oleh Tim Harmonisasi PPH Nasional atas kerjasama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Berdasarkan berat pangan yang dikonsumsi secara umum kuantitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2024 masih kurang dari estimasi idealnya pada sebagian besar kelompok pangan kecuali pada kelompok padi-padian, pangan hewani dan lain-lain. Total asupan energi konsumsi pangannya hanya mencapai 1.991 kkal/kapita/hari (94,6 %AKE). Adapun total asupan protein konsumsi pangannya mencapai 58,7 gram/kapita/hari (112,4 %AKP). Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor belum cukup yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi yang masih kurang dari 100 %AKE. Demikian pula secara kualitas, konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2024 baru mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,1 yang berarti masih kurang 12,9 poin jika dibandingkan skor PPH ideal sebesar 100.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor menurut data Susenas Tahun 2024 terlihat bahwa estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor belum optimal. Kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhannya melebihi idealnya berdasarkan Pola

Pangan Harapan hanyalah hanya padi-padian (118,0 kg/kapita), minyak & lemak (31,9 kg/kapita), dan kelompok lain-lain (91,7 kg/kapita). Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah belum memenuhi estimasi idealnya. Jika dibandingkan dengan estimasi ideal kebutuhannya maka konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 masih kekurangan pangan kelompok umbi-umbian (29,6 kg/kapita), pangan hewani (1,7 kg/kapita), buah/biji berminyak (3,8 kg/kapita), kacang-kacangan (8,6 kg/kapita), gula (7,2 kg/kapita), serta kelompok sayur dan buah (13,4 kg/kapita).

Secara umum, capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayah di Kabupaten Bogor tahun 2024 menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduknya. Kelompok pangan yang realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayah telah melebihi estimasi idealnya hanyalah kelompok padi-padian (670,3 ribu ton), pangan hewani (242,0 ribu ton), dan lain-lain (190,2 ribu ton) per tahun. Untuk dapat mencapai estimasi ideal total kebutuhan konsumsi pangan wilayah di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 masih kekurangan pangan kelompok umbi-umbian (168,4 ribu ton), pangan hewani (9,8 ribu ton), buah/biji berminyak (21,7 ribu ton), kacang-kacangan (49,1 ribu ton), gula (41,0 ribu ton), serta sayur dan buah (76,3 ribu ton).

Informasi dasar tentang capaian situasi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder terkait pembangunan ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Bogor pada setiap tahapan dan proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil kajian Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan

evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor. Dengan dukungan data dan informasi dari hasil kajian ini diharapkan sinergisitas kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan ketahanan pangan, khususnya di bidang konsumsi pangan, di wilayah Kabupaten Bogor dapat lebih dioptimalkan.

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan berdasarkan data Susenas ini baru mempertimbangkan kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk di tingkat rumahtangga. Oleh karena itu, untuk menghitung kebutuhan konsumsi pangan secara keseluruhan perlu ditambah lagi dengan estimasi konsumsi pangan penduduk di luar rumahtangga, khususnya di rumahsakit, hotel dan restoran, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengestimasi lebih jauh tentang total kebutuhan pangan wilayah harus pula mempertimbangkan kebutuhan pangan wilayah untuk non konsumsi penduduk, seperti : industri, energi alternatif, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis tentang kebutuhan pangan akan lebih komprehensif, sehingga dapat mencakup kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk didalam dan diluar rumahtangga maupun untuk kebutuhan lainnya.

Agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor dimasa mendatang, maka perlu dilakukan analisis situasi yang paling tidak mencakup data periode terakhir RPJMD Kabupaten Bogor. Dengan demikian dapat dilakukan analisis tren pertumbuhan pada indikator pokok situasi konsumsi pangan. Hasil analisis tren pertumbuhan tersebut merupakan salah satu faktor utama yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam analisis sasaran konsumsi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan periode RPJMD berikutnya.

Hasil analisis sasaran konsumsi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan tersebut perlu disinergiskan pula dengan hasil analisis ketersediaan pangan wilayah. Berdasarkan hasil analisis awal tentang capaian pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan serta ketersediaan pangan wilayah tersebut, maka dapat dilakukan kajian lebih lanjut tentang analisis penyediaan pangan wilayah. Pada analisis tahap ini fokus kajian sudah mensinergiskan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dengan potensi dan daya dukung wilayah, baik potensi agroekologi maupun sosial ekonomi.

Mengingat saat ini merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, maka diperlukan pula kajian lebih komprehensif untuk menyusun naskah akademik roadmap pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2025-2045. Oleh karena itu perl dilengkapi dengan kajian mendalam tentang preferensi pangan penduduk melalui survei konsumsi pangan mandiri untuk menggali lebih jauh berbagai faktor determinan berperan dalam membentuk pola konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan demikian, diharapkan dapat disusun berbagai strategi dan alternatif program ketahanan pangan yang efektif dan efisien pada berbagai tingkat sasaran mulai dari tingkat individu, rumah tangga dan wilayah.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Analisis .....	3
C. Kegunaan Analisis.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
A. Landasan Hukum dan Kebijakan .....	4
B. Landasan Teoritis dan Metodologis .....	12
C. Definisi Atau Batasan Istilah .....	16
III. METODE ANALISIS .....	18
A. Desain dan Waktu Analisis.....	18
B. Sumber dan Jenis Data Analisis .....	18
C. Pengolahan dan Analisis Data .....	20
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BOGOR .....	24
A. Geografi dan Agroekologi .....	24
B. Demografi dan Ekonomi .....	32
V. ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK .....	38
A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk.....	38
B. Konsumsi dan Kecukupan Gizi .....	39
C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	44
D. Gap Situasi Konsumsi Pangan .....	45
VI. ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN .....	49
A. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk.....	49
B. Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah .....	50
VII. KESIMPULAN DAN SARAN .....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel II.B.2.	Standar Komposisi Pola Pangan Harapan Nasional Berdasarkan Pedoman Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan di Indonesia .....	15
Tabel III.B.1.	Jenis dan Sumber Data Pokok Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor.....	19
Tabel IV.A.1.	Luas Wilayah Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2024. ....	25
Tabel IV.A.2.	Tata Guna Lahan di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2023. ....	27
Tabel IV.A.2.	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis di Wilayah Kabupaten Bogor.....	28
Tabel IV.A.3.	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditas Perikanan Strategis di Wilayah Kabupaten Bogor .....	30
Tabel IV.A.4.	Perkembangan Produksi Komoditas Peternakan Strategis di Wilayah Kabupaten Bogor .....	31
Tabel IV.B.1.	Jumlah & Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2024. ....	32
Tabel V.A.1.	Situasi Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	38
Tabel V.B.1.	Kontribusi Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	39
Tabel V.B.2.	Kontribusi Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	41
Tabel V.B.3.	Capaian Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024. ....	43
Tabel V.C.1.	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	45
Tabel V.D.1.	Gap Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 .	46
Tabel V.D.2.	Gap Kontribusi Kecukupan Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 .	47
Tabel V.D.3.	Gap Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	48
Tabel VI.A.1.	Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 .....	49
Tabel VI.B.1.	Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Wiayah di Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	51

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Program peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pencapaian ketahanan pangan nasional yang diawali dengan perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Negara atau wilayah dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik jika mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Pangan adalah kebutuhan dasar hayati manusia yang paling utama, karena itu pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi individu. Selain itu juga pangan memegang peranan yang paling penting penting dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif. Mengingat pentingnya hal ini, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2004). Oleh karena itu, bidang ketahanan pangan menjadi salah satu urusan wajib pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan

bergizi seimbang baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Ketahanan pangan terwujud apabila telah memenuhi dua aspek sekaligus. Pertama, tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Permasalahan pokok terkait ketahanan pangan di tingkat rumahtangga yang memegang peranan penting adalah aspek pola konsumsi pangan masyarakat. Beberapa permasalahan konsumsi pangan antara lain adalah: (a) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan daya beli pangan yang rendah, (b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, (c) Masih dominannya konsumsi energi yang berasal dari beras dan (d) Rendahnya kesadaran dalam penerapan sistem sanitasi dan higienis serta keamanan pangan.

Salah satu jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah panganekaragaman konsumsi pangan. Perkembangan konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, konsumsi pangan penduduk merupakan pondasi ketahanan pangan yang harus selalu dipantau secara rutin oleh unit kerja ketahanan pangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis perkembangan situasi konsumsi pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk. Pada gilirannya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan dan perencanaan konsumsi dan kebutuhan pangan penduduk.

Dalam rangka mewujudkan upaya di atas, pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bogor secara khusus telah melaksanakan kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.

## **B. Tujuan Analisis**

Secara umum tujuan kajian ini adalah menganalisis Pola Pangan Harapan konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Menganalisis estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.

## **C. Kegunaan Analisis**

Tersedianya informasi tentang Pola Pangan Harapan konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Hukum dan Kebijakan

Perencanaan pembangunan tidak dapat terlepas dari aspek hukum dan kebijakan pembangunan. Aspek hukum menentukan hal-hal pokok seperti dasar hukum yang mengamanatkan suatu kegiatan perencanaan, aturan bagaimana dan oleh siapa perencanaan itu dilakukan atau proses administrasinya, bagaimana legalitas suatu proses pembangunan. Aspek kebijakan pembangunan yang erat kaitannya dengan birokrasi, sangat menentukan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan perencanaan pembangunan. Bahkan lebih dari itu, kebijakan pembangunan sangat berpengaruh pada operasionalisasi dan keberhasilan implementasi suatu program pembangunan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk

20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renstra (Rencana Strategis) SKPD disusun berpedoman pada RPJMD. Renja (Rencana Kerja) SKPD merupakan penjabaran dari Renstra. Renja SKPD disusun berpedoman pada RKPD. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD merupakan penjabaran dari Renja SKPD. RKA SKPD dikompilasi menjadi RAPBD. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBD disetujui. DPA disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk setiap SKPD.

Beberapa produk hukum dan kebijakan yang menjadi dasar pertimbangan dalam kajian atau analisis terkait pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bogor antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2017-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;
20. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;
21. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pola Pangan Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 237);
22. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pola Pangan Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 237);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 I - 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 06 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6),
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 105),
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2021 tentang Intensifikasi Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 69).
33. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 12).
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;

35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026; dan
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Pemenuhan pangan dasar bagi masyarakat juga amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemenuhan hak dasar atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan secara nasional.

Lebih jauh undang-undang tersebut menjelaskan bahwa: 1) Pasal 60 Ayat 1: Pemerintah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif; 2) Pasal 60 Ayat 2: Penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; Pasal 62 : Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan di

kabupaten/kota mencakup 4 urusan dan 9 sub-urusan, yaitu: 1), Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian (urusan kabupaten/kota adalah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota); 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan urusan kabupaten/kota adalah : a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota, c) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, d) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); 3). Penanganan kerawanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah: a) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, b) penanganan kerawanan pangan, c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan); (4) Keamanan pangan (urusan kabupaten/kota adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar).

Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk termasuk kedalam salah satu jenis pelayanan dasar pembangunan bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, perkembangan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur secara lebih detail terkait dengan hal tersebut, antara lain:

- 1) Pasal 25 : Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
  - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;

- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pasal 26 Ayat 1: Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui:
- a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
  - b. pengoptimalan pangan lokal;
  - c. dan seterusnya.
- 3) Pasal 27 Ayat 1 : Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
- a. prinsip gizi seimbang;
  - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
  - c. ramah lingkungan; dan
  - d. aman.
- 4) Pasal 27 Ayat 2: Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya.
- 5) Pasal 27 Ayat 3: Ketentuan mengenai Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

## **B. Landasan Teoritis dan Metodologis**

Perbaikan gizi masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat. Acuan untuk merencanakan dan menilai pemenuhan konsumsi gizi seseorang disebut kebutuhan gizi (nutrient requirement), sedangkan acuan untuk merencanakan dan menilai konsumsi pangan kelompok orang atau masyarakat di suatu daerah/wilayah disebut kecukupan gizi (nutrient allowances atau Recommended Dietary Allowances/RDA). Di Indonesia, *recommended dietary allowances* disebut juga dengan Angka Kecukupan

Gizi (AKG). AKG pertama kali ditetapkan pada tahun 1968, selanjutnya diperbaharui melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG).

Dalam melakukan penilaian terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat, digunakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). WNPG VIII tahun 2004 dan IX tahun 2008 menganjurkan AKG ditingkat konsumsi pangan sebesar 2.000 kilokalori/kapita/hari dan 52 gram protein/kapita/hari. AKG tersebut mengalami penyesuaian dalam WNPG X tahun 2012, dan telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2013 sebesar 2.150 kilokalori/kapita/hari dan 57 gram protein/kapita/hari. Angka Kecukupan Gizi disesuaikan kembali melalui WNPG XI tahun 2018 menganjurkan AKG di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.100 kilokalori/kapita/hari dan 57 gram protein/kapita/hari, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2019. Untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, AKG tersebut perlu diterjemahkan dalam satuan yang dikenal oleh para penyelenggara pangan menjadi volume bahan pangan atau kelompok pangan.

Menurut FAO-RAPA, masyarakat di negara-negara Asia-Pasifik memiliki keragaman pola konsumsi pangan sesuai dengan keragaman agro-ekologi setempat. Dalam publikasinya yang berjudul Sustainable Healthy Diets Guiding Principles (FAO dan WHO, 2019) disebutkan bahwa salah satu aspek yang bisa mendukung diet sehat berkelanjutan adalah territorial diets. Territorial diet adalah diet yang dikaitkan dengan geografi tertentu yang terkait dengan sumber daya biofisik (tanah, iklim mikro, dan lansekap) yang menjadi ciri pertanian dan ekonomi, faktor ekologi tertentu, konteks sejarah, budaya dan tatanan sosial termasuk kelembagaan, organisasi, pengetahuan dan praktik baik di lingkungan setempat. Oleh karena itu, territorial diet terbentuk dari rangkaian proses kompleks dan bersifat dinamis yang dapat berubah seiring waktu dengan mengintegrasikan pengaruh lain melalui pergerakan orang dan barang, budaya dan material, termasuk makanan dari luar wilayah.

Selama ini Indonesia mengadopsi konsep Desirable Dietary Pattern (DDP) yang diterjemahkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH) untuk mengevaluasi dan membuat perencanaan pangan sesuai dengan karakteristik agro-ekologi dan budaya pangan setempat. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan kata lain, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun kualitas dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Konsep PPH yang dikembangkan oleh FAO-RAPA mempertimbangkan keragaman pola konsumsi antar negara di wilayah Asia Pasifik. Pendekatan yang digunakan pada dasarnya merupakan konsep dari territorial diets untuk mendukung diet sehat. Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup 9 (sembilan) kelompok pangan, yaitu: (1) padi-padian; (2) umbi-umbian; (3) pangan hewani; (4) minyak dan lemak ; (5) buah/biji berminyak; (6) kacang-kacangan; (7) gula; (8) sayur dan buah; (9) lain-lain (aneka bumbu dan ahan minuman). Mempertimbangkan variasi antar wilayah/teritori, PPH disajikan dalam angka range menurut kelompok pangan, misalnya untuk padi-padian disarankan memberikan kontribusi energi sebesar 40-60%, pangan hewani 5-20%, dan seterusnya.

Sejak konsep PPH diadopsi di awal tahun 1990-an di Indonesia, meski disadari bahwa wilayah Indonesia begitu luas dengan keragaman agro-ekologi dan budaya pangan yang sangat bervariasi, namun hanya satu komposisi PPH yang digunakan secara nasional bagi seluruh wilayah. Kontribusi atau proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok di dalam komposisi PPH nasional tersebut sesuai hasil kesepakatan

Departemen Pertanian tahun 2001, yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman) 3%.

Konsep PPH merupakan manifestasi konsep gizi seimbang yang didasarkan pada konsep triguna pangan. Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi. Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan sebagai sumber zat tenaga, zat pembangun, serta zat pengatur. Adapun standar komposisi Pola Pangan Harapan secara nasional secara detail disajikan pada Tabel II.B.2.

Tabel II.B.2. Standar Komposisi Pola Pangan Harapan Nasional Berdasarkan Pedoman Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan di Indonesia

No	KelompokPangan	Komposisi Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1.	Padi – padian	289	1050	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	105	126	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	157	252	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	21	210	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	11	63	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	37	105	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	31	105	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	262	126	6,0	5,0	30,0
9.	Lain-lain	-	63	3,0	0,0	0,0
Jumlah			2100	100,0		100,0

Sumber: Bapanas (2024)

### C. Definisi Atau Batasan Istilah

**Gizi** adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan & kesehatan manusia.

**Angka Kecukupan Energi** adalah rata-rata jumlah energi yang diperlukan oleh setiap orang dalam suatu populasi di suatu wilayah untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

**Angka Kecukupan Protein** adalah rata-rata jumlah protein yang diperlukan oleh setiap orang dalam suatu populasi di suatu wilayah untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

**Pola Pangan Harapan (PPH)** adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan.

**Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

**Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

**Pangan Strategis** yang dimaksud dalam analisis ini adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan

masyarakat serta banyak dikonsumsi oleh penduduk dibandingkan dengan jenis pangan lainnya.

**Konsumsi Pangan Aktual** adalah jumlah dan jenis pangan yang biasanya dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun.

**Konsumsi Pangan Ideal** adalah jumlah dan jenis pangan yang semestinya dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun yang mengacu pada pemenuhan kecukupan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan.

**Kebutuhan Konsumsi Pangan** adalah jumlah dan jenis pangan yang semestinya tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun yang mengacu pada pemenuhan kecukupan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan.

### III. METODE ANALISIS

#### A. Desain dan Tahapan Analisis

Kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor menggunakan desain *quantitative explorative study* dengan menggali data dan informasi statistik untuk merumuskan karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Adapun lingkup kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi bahan pustaka terkait dengan peraturan dan perundang-undangan, kebijakan dan strategi serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan yang bersumber dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga terkait lainnya.
2. Inventarisasi data-data sekunder yang digunakan dalam analisis, khususnya data-data yang terkait dengan karakteristik agroekologi, demografi, dan sosial ekonomi serta konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor yang bersumber dari publikasi dan/atau laporan statistik instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor atau lembaga-lembaga terkait lainnya.
3. Pengolahan dan analisis data, yang mencakup perhitungan rata-rata kuantitas konsumsi pangan, kecukupan energi dan protein, skor Pola Pangan Harapan, serta estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor.
4. Penyusunan laporan hasil analisis, yang secara garis besar mencakup bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode analisis, keadaan umum wilayah, analisis situasi konsumsi pangan, analisis dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan, serta kesimpulan dan saran.

#### B. Sumber dan Jenis Data Analisis

Sumber data pokok yang digunakan dalam Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor merupakan data sekunder dari berbagai lembaga dan instansi terkait. Jenis dan sumber data

yang digunakan dalam kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel II.B.1. Sebagaimana disajikan pada tabel tersebut jenis data pokok yang digunakan adalah data konsumsi pangan penduduk yang didasarkan pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data konsumsi pangan penduduk tersebut disajikan dalam bentuk tabel rata-rata konsumsi pangan per komoditas dalam satuan URT per kapita/minggu.

Tabel III.B.1. Jenis dan Sumber Data Pokok Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor

No	Jenis Data	Parameter Pokok	Tahun Data	Sumber Data	
				Publikasi	Intansi
1	Konsumsi Pangan Penduduk	Rata-rata kuantitas konsumsi pangan penduduk per komoditas dalam satuan URT per kapita/minggu	2024	Data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2024	Badan Pusat Statistik Badan Pangan Nasional
2	Karakteristik Geografi dan Demografi Wilayah	Luas Wilayah Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	2024	Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2025	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
3	Karakteristik Ekonomi Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita dan lain-lain	2024	Statistik Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survei tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga, mencakup konsumsi makanan dan bukan makanan. Untuk konsumsi/pengeluaran

makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya, sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisisioner Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggunakan data Susenas, diperlukan data/instrumen pendukung, antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM), Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan PPH (Daftar Konversi Bentuk Pangan).

### **C. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan secara sistematis dan metodologis dalam rangka mempersiapkan data agar dapat dikaji dan digunakan sesuai tujuan pokok kajian. Tahap pertama yang dilakukan setelah semua data terkumpul dan semua instrumen terisi dengan baik adalah rekapitulasi. Tahapan pengolahan data yang tidak kalah pentingnya adalah editing data. Editing data merupakan suatu proses pengelolaan data dalam rangka mempersiapkan data sebelum data dientri dan dianalisis lebih lanjut, yang meliputi : pengecekan ulang dan penyesuaian unit atau satuan data. Editing data bertujuan untuk menghindari adanya kekeliruan data yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan dan perbedaan unit atau satuan data.

Secara umum analisis data dilakukan terhadap berbagai data sekunder yang berhasil dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan analisis kuantitatif digunakan untuk menyajikan dan menganalisa keragaan statistik berbagai jenis indikator situasi ketahanan pangan, khususnya situasi konsumsi pangan penduduk. Parameter statistik yang digunakan adalah rata-rata dan persentasi. Untuk memudahkan pembahasan hasil analisis sebagian besar data disajikan dalam bentuk tabel ringkasan. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang sistematis dan praktis dalam bentuk Aplikasi Komputer Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan

Berdasarkan Data Susenas Tahun 2024 yang dikembangkan atas kerjasama Badan Pangan Nasional Pangan (Bapanas) Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Aplikasi tersebut disusun dalam bentuk Spreadsheet Microsoft Excel for Windows. Agar hasil analisis menjadi lebih akurat serta memiliki kekuatan analisis dan taraf signifikansi yang baik, maka telah dilakukan cleaning terhadap data hasil entri pada aplikasi komputer. Cleaning data adalah suatu proses check and recheck terhadap nilai-nilai data pada data hasil entri data sebelum dilakukan proses analisis terhadap data.

Indikator utama situasi konsumsi pangan yang dianalisis mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas yang dianalisis berdasarkan mencakup total dan/atau rata-rata konsumsi pangan menurut jenis dan kelompok pangan, tingkat kecukupan energi dan protein, serta pencapaian skor Pola Pangan Harapan konsumsi pangan. Penilaian aspek ini ditinjau dari jumlah pangan yang dikonsumsi (satuan berat pangan) dan konsumsi zat gizi yang terkandung pada bahan pangan (energi dan protein). Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah jumlah pangan yang dikonsumsi sudah dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk hidup sehat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang terdiri dari Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP).

Untuk menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat digunakan parameter Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Perhitungan dan analisis TKE dan TKP didasarkan pada AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari energi dan AKP sebesar 57 gram/kapita/hari protein. Beberapa kajian menunjukkan bahwa bila konsumsi pangan terpenuhi sesuai dengan standar AKG dan prinsip keberagaman, maka kebutuhan zat gizi juga akan terpenuhi. Jadi penilaian kuantitas konsumsi pangan dilihat dari %AKE atau tingkat kecukupannya apakah sudah melebihi standar atau masih dibawah standar kecukupan yang diharapkan.

Untuk menganalisis kualitas konsumsi pangan digunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor maksimal 100 yang mengacu pada standar PPH Nasional yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, dengan kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan sebagai berikut : 50% padi-padian, 6 % umbi-umbian, 12 % pangan hewani, 10 % minyak dan lemak, 3 % buah/biji berminyak, 5 % kacang-kacangan, 5 % gula, 6 % sayur dan buah, dan 3 % lain-lain. Adapun langkah menghitung skor PPH konsumsi pangan penduduk adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai jumlah energi yang diperoleh dari setiap jenis pangan yang dikonsumsi
- 2) Mengelompokkan pangan kedalam 9 kelompok pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan
- 3) Menghitung nilai total dan sub total energi masing-masing kelompok pangan
- 4) Menghitung kontribusi energi berdasarkan dalam persentase masing-masing kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan.
- 5) Mengalikan kontribusi energi dengan bobot masing-masing kelompok pangan sesuai dengan standar perhitungan PPH Ideal Nasional, sehingga diperoleh skor untuk setiap kelompok pangan.
- 6) Apabila nilai hasil perhitungan melebihi nilai ideal maka digunakan nilai ideal, dan apabila nilai hasil perhitungan kurang dari nilai ideal maka digunakan nilai hasil perhitungan sebagai skor.
- 7) Menjumlahkan skor semua kelompok pangan sehingga diketahui skor PPH konsumsi pangan.

Berdasarkan kontribusi energi sesuai standar PPH dan AKE nasional sebesar 2100 kkal/kapita/hari, kontribusi energi konsumsi pangan yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : padi-padian (1050 kkal), umbi-umbian (126 kkal), pangan hewani (252

kkal), minyak dan lemak (210 kkal), buah/biji berminyak (63 kkal), kacang-kacangan (105 kkal), gula (105 kkal), sayur dan buah (126 kkal), dan pangan lainnya (63 kkal).

Kontribusi energi dapat dikonversi kedalam berat jenis pangan acuannya. Adapun pangan acuan setiap kelompok pangan adalah sebagai berikut: padi-padian (beras giling), umbi-umbian (ubi kayu), pangan hewani (daging sapi), minyak dan lemak (minyak kelapa sawit), buah/biji berminyak (kelapa daging), kacang-kacangan (kacang tanah), gula (gula pasir), sayur dan buah (bayam), dan lain-lain (merica). Rata-rata berat ideal masing-masing kelompok pangan adalah sekitar : 289 gram padi-padian, 95 gram umbi-umbian, 147 gram pangan hewani, 26 gram minyak dan lemak, 11 gram buah/biji berminyak, 37 gram kacang-kacangan, 32 gram gula, 242 gram sayur dan buah, dan 16 gram pangan lainnya.

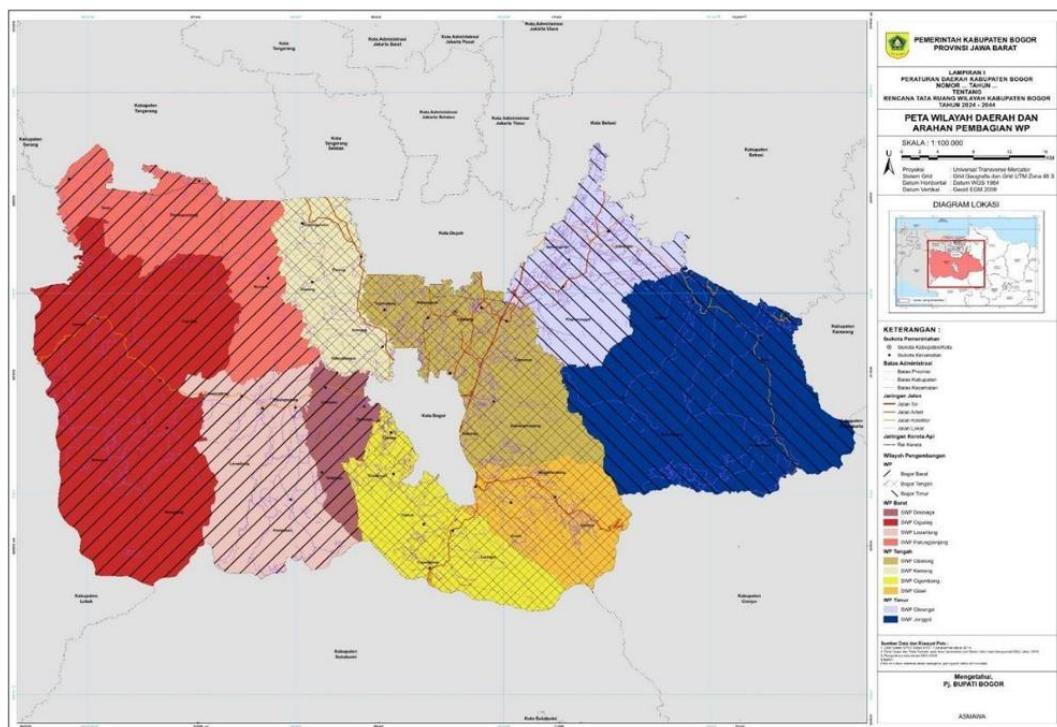
Estimasi kebutuhan konsumsi pangan ideal per jenis pangan didasarkan pada persen energi suatu jenis pangan pada kelompok pangan masing-masing dikalikan jumlah energi ideal tiap kelompok dengan asumsi kontribusi antar jenis pangan tidak berubah. Estimasi berat pangan ideal untuk suatu jenis pangan diperoleh dari hasil konversi jumlah energi ideal tiap jenis pangan kedalam berat pangan. Jumlah kebutuhan konsumsi pangan penduduk tersebut didasarkan pada angka rata-rata konsumsi pangan ditambah 10%.

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah tahun tertentu dihitung berdasarkan perkalian rata-rata kebutuhan konsumsi pangan (kg/kapita/tahun) dengan jumlah penduduk tahun yang sama. Hasil estimasi kebutuhan pangan wilayah untuk mencapai sasaran skor PPH pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan strategi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Selain informasi tentang kelompok jenis pangan apa saja yang masih perlu ditingkatkan, hasil analisis tersebut juga dapat menjadi acuan estimasi tingkat pertumbuhan yang diperlukan agar target tersebut dapat dicapai.

## IV. KEADAAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BOGOR

### A. Geografi dan Agroekologi

Secara astronomis Kabupaten Bogor terletak antara – 6° 18' Lintang Utara dan – 6° 47' Lintang Selatan dan antara 106° 01'– 107° 103' Bujur Timur. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berada pada ketinggian 15 – 2000 M di atas permukaan laut yang sebagian di apit oleh gunung – gunung dan bukit serta memiliki 6 daerah aliran sungai.



Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2024 RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Gambar IV.A.1. Peta Wilayah Daerah dan Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Bogor memiliki batas-batas: Utara –Kota Bogor; Selatan –Kabupaten Sukabumi; Barat – Kabupaten Lebak Provinsi Banten; Timur –Kabupaten Purwakarta; Timur laut – Kabupaten Bekasi; Tenggara – Kabupaten Cianjur dan Tengah – Kota Bogor. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 2,991,78 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 40 kecamatan yang mencakup 416 desa & 19 kelurahan.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sukamakmur dengan luas 182,94 km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Ciomas dengan luas wilayah 17,88 km<sup>2</sup>.

Tabel IV.A.1. Luas Wilayah Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2024.

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq km)
(1)	(2)	(3)
Nanggung	Parakan Muncang	157,93
Leuwiliang	Leuwimekar	92,27
Leuwisadeng	Leuwisadeng	36,07
Pamijahan	Gunungsari	125,17
Cibungbulang	Cimanggu 2	37,70
Ciampea	Bojongrangkas	33,98
Tenjolaya	Tapos 1	36,33
Dramaga	Dramaga	25,57
Ciomas	Pagelaran	17,88
Tamansari	Tamansari	39,26
Cijeruk	Cipelang	47,99
Cigombong	Cigombong	46,54
Caringin	Cimande Hilir	77,89
Ciawi	Bendungan	47,06
Cisarua	Leuwimalang	71,04
Megamendung	Sukamaju	63,42
Sukaraja	Cimandala	43,49
Babakan Madang	Babakan Madang	88,58
Sukamakmur	Sukamakmur	182,94
Cariu	Cariu	84,81
Tanjungsari	Tanjungsari	147,27
Jonggol	Jonggol	134,38
Cileungsi	Cileungsi	70,08
Klapanunggal	Kembang Kuning	95,81
Gunung Putri	Wanaherang	60,99
Citeureup	Puspanegara	72,32
Cibinong	Cirimekar	47,08
Bojonggede	Bojonggede	28,93
Tajurhalang	Tajurhalang	30,38
Kemang	Kemang	33,09
Rancabungur	Rancabungur	23,18
Parung	Parung	27,74
Ciseeng	Cibentang	39,91
Gunung Sindur	Gunung Sindur	48,56
Rumpin	Rumpin	139,07
Cigudeg	Cigudeg	179,30
Sukajaya	Sukajaya	166,24
Jasinga	Pamagersari	137,54
Tenjo	Singabraja	83,03
Parung Panjang	Parung Panjang	70,98
<b>Bogor</b>	<b>Cibinong</b>	<b>2.991,78</b>

Sumber: Kabupaten Bogor Dalam Angka (BPS, 2025)

Secara topografi, Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500–1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl.

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 3.500–4.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Kemudian mengenai rata-rata suhu di wilayah Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2024 berkisar diantara 26,1°-27,3°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 26,7°C. Sedangkan untuk rata-rata kelembaban udara di wilayah Kabupaten Bogor berkisar diantara 83 persen, dengan kecepatan angin yang cukup rendah diantara 2,9 - 4,0 m/detik dan penyinaran matahari terendah 13,8% terjadi pada bulan Desember, sampai dengan tertinggi 86% yang terjadi pada bulan Oktober.

Kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian lereng yang bervariasi antara 0-8% hingga >40%. Secara keseluruhan, kelas kemiringan 0-8% merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor yakni 130.320,76 Ha dan yang terkecil pada kelas kemiringan lereng >40% yakni seluas 9.800,52 Ha. Kondisi geologi Kabupaten Bogor terdiri dari jenis batuan batu gamping, batuan intrusi, batuan tersier, endapan permukaan, gunung api muda dan gunung api tua. Asosiasi Latosol

merah dan latosol coklat kemerahan dengan luas 74.488,47 Ha mendominasi jenis tanah di bagian utara.

Berdasarkan peta guna tutupan lahan, mayoritas penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bogor adalah hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi yaitu seluas 84.412.47 Ha. Penggunaan lahan paling kecil yaitu lahan yang digunakan untuk hutan kota, jalur hijau dan taman kota yaitu seluas 8.50 Ha.

Tabel IV.A.2. Tata Guna Lahan di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2023.

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	4.174,34	1,40
2	Bangunan non-permukiman lain	210,38	0,07
3	Bangunan permukiman desa (berasosiasi dengan vegetasi pekarangan)	23.097,19	7,72
4	Bangunan permukiman kota	58.453,01	19,54
5	Danau/telaga alami	557,67	0,19
6	Hutan kota, jalur hijau dan taman kota	8,49	0,00
7	Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	84.403,12	28,21
8	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan rendah	745,51	0,25
9	Kebun campuran	16.064,56	5,37
10	Ladang/tegalan dengan palawija	17.512,00	5,85
11	Lahan terbuka lain	968,61	0,32
12	Landas pacu (runway) dan taxiway	32,00	0,01
13	Padang Rumput	61,96	0,02
14	Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	1.726,73	0,58
15	Perkebunan	33.798,75	11,30
16	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	44.849,52	14,99
17	Semak/belukar	8.439,01	2,82
18	Stadion dan sarana olah raga	2.099,45	0,70
19	Sungai	1.757,05	0,59
20	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	15,30	0,01
21	Tubuh air lain	203,20	0,07
<b>TOTAL</b>		<b>299.177,85</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terdiri dari komoditas strategis, yaitu Padi Sawah dan komoditas unggulan tanaman pangan,

antara lain : Talas, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Adapun sentra komoditas strategis Padi Sawah tersebar hampir di 40 (empat puluh) Kecamatan. Jika melihat data pada tabel 2.24, dapat disimpulkan bahwa produksi padi sawah pada tahun 2021 sebanyak 502.363 Ton. Angka ini menurun menjadi 484.957 Ton pada tahun 2022, atau sekitar 3,47% lebih rendah. Penurunan produksi berlanjut pada tahun 2023, mencapai 455.365 Ton, yang merupakan penurunan sekitar 6,10% dari tahun 2022 dan penurunan kumulatif sekitar 9,41% dari tahun 2021.

Tabel IV.A.2. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis di Wilayah Kabupaten Bogor

No	Komoditas	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	79.994	502.363	77.996	484.957	71.645	455.365	73.154	463.019
2	Talas	790	12.728	752	12.135	3.160	73.432	650,50	11.732
3	Ubi Jalar	2.524	43.045	2.367	40.803	2.770	47.752	2.851	54.270
4	Ubi Kayu	3.218	74.691	3.179	73.845	680	10.983	3524,80	95.291
5	Jagung	90	498	139	766	291	1.597	158	871
6	Kacang Tanah	773	1.047	684	953	675,21	949,46	639,10	914

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026

Produksi padi sawah mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 463.019 Ton, atau sekitar 1,68% lebih tinggi dari tahun 2023. Meskipun demikian, produksi tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Penurunan produksi padi sawah yang konsisten dari 2021 hingga 2023 menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, seperti alih fungsi lahan, kurangnya irigasi, atau masalah kesuburan tanah. Tidak berbeda jauh dengan produksi padi, Produksi talas pada tahun 2021 pun mengalami penurunan dari 12.728 Ton menjadi 12.135 Ton pada tahun 2022, atau sekitar 4,66%

lebih rendah. Kendati demikian, produksi talas sempat mengalami peningkatan besar pada tahun 2023, mencapai 73.432 Ton, dan pada tahun 2024, produksi talas kembali anjlok menjadi 11.732 Ton, atau turun sebesar 84,02% dari tahun 2023.

Komoditas unggulan tanaman pangan lainnya adalah ubi jalar. Jenis yang dikembangkan adalah varietas AC kuning dan AC putih dengan pertimbangan bahwa varietas ini memiliki potensi produktivitas yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit boleng. Produksi ubi jalar Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 47.752 Ton dari sebelumnya 40.803 Ton. Pada tahun 2024, ubi jalar kembali mengalami peningkatan menjadi 54.270 Ton atau 13,64% dari tahun 2023. Berbeda dengan ubi jalar, produksi ubi kayu terus mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Baru pada tahun 2024, produksi ubi kayu melonjak menjadi 95.291 Ton, atau meningkat sebesar 767,61% dari tahun 2023. Penumbuhan agribisnis komoditas ubi jalar dan ubi kayu telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis produk dari umbi segar menjadi tepung halus atau tepung tapioka setelah adanya bimbingan teknis dan bantuan alat pengolahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kegiatan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para petani.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel IV.A.3. diketahui bahwa produksi budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Bogor masih menjadi tumpuan kebutuhan masyarakat, baik untuk ikan konsumsi, bibit ikan maupun ikan hias. Adapun pada tahun 2022 produksi ikan konsumsi di Kabupaten Bogor mencapai 118.711,84 ton dengan luas lahan sebesar 2.139,79 hektar. Kemudian pada tahun 2023, produksi ikan konsumsi mengalami peningkatan sebanyak 8.182,61 ton atau berhasil melampaui 6,89 persen capaian tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tahun 2024, capaian produksi ikan konsumsi mencapai 133.634,86 ton, dengan demikian capaian tersebut berhasil melampaui 126.894,45 ton atau 5,31 persen dari tahun sebelumnya. Adapun tiga kontribusi terbesar untuk capaian tersebut berasal dari produksi jenis ikan lele sebanyak 91.446,23

ton, ikan nila sebanyak 12.667,06 ton dan ikan mas sebanyak 11.283,44 ton. Berikut ini gambaran mengenai perkembangan produksi ikan konsumsi berdasarkan jenis ikan di Kabupaten Bogor dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Tabel IV.A.3. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Komoditas Perikanan Strategis di Wilayah Kabupaten Bogor

No	Komoditas	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Areal (Ha)	Produksi	Luas Areal (Ha)	Produksi	Luas Areal (Ha)	Produksi
1	Ikan Konsumsi (Ton)	2.139,79	118.711,84	1.631,23	126.894,45	1.595,26	133.634,86
2	Ikan Hias (RE)	36,78	315.882,66	36,78	296.417,10	39,78	302.218
3	Benih Ikan (RE)	1.153,37	5.308.176	1.153,37	5.770.236,02	1.153,37	6.101.021,78

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026

Pada tahun 2023 produksi hasil peternakan sebanyak 351.009 ton, terdiri dari produksi daging sebanyak 221.525 ton, produksi telur sebanyak 114.299 ton, produksi susu sebanyak 15.185 ton. Komoditas unggulan usaha peternakan pada tahun 2023 antara lain sapi perah yang sentranya terletak di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Cijeruk. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk, selain susu murni diantaranya keju, yoghurt, kefir, permen susu dan bahan makanan lainnya. Komoditas peternakan lainnya yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan tahun 2023 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak 25.375 ekor. Sentra komoditas unggulannya terdapat di Kecamatan Jonggol dan Cariu, dengan daerah pengembangannya di Kecamatan Tanjungsari. Konsumsi protein hewani salah satunya didukung oleh produksi daging, susu dan produksi telur. Mengenai komoditas telur yang dominan didukung oleh produksi dari ayam ras petelur dengan populasi ayam ras petelur pada tahun 2023

sebanyak 9.200.787 ekor. Adapun produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 150.112.000 Kg. Berikut ini perkembangan komoditas peternakan di Kabupaten Bogor tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Tabel IV.A.4. Perkembangan Produksi Komoditas Peternakan Strategis di Wilayah Kabupaten Bogor

<b>Produksi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Daging	182.180,54	191.773,62	189.322,00	198.874	191.930	221.525
Telur	47.405,81	61.246,54	179.672,00	146.482	150.067	114.299
Susu	18.591,32	21.182,15	36.805,79	23.829	22.528	15.185
<b>Kabupaten Bogor</b>	<b>248.177,00</b>	<b>274.202,31</b>	<b>354.694,00</b>	<b>369.194,72</b>	<b>382.549,56</b>	<b>351.009,00</b>

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026

## B. Demografi dan Ekonomi

Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa pada 2024 penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 5.682.303 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,23 persen. Sebagaimana disajikan pada Tabel IV.B.1. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas 2.912.658 jiwa laki-laki (51,26 persen) dan 2.769.645 jiwa perempuan (48,77 persen).

Tabel IV.B.1. Jumlah & Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2024.

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Nanggung	104.160	1,50
Leuwiliang	128.660	0,84
Leuwisadeng	79.625	0,76
Pamijahan	166.226	1,51
Cibungbulang	153.668	1,43
Ciampea	176.388	1,25
Tenjolaya	67.023	1,39
Dramaga	113.736	0,80
Ciomas	178.534	1,24
Tamansari	115.625	1,61
Cijeruk	96.724	1,44
Cigombong	100.962	0,89
Caringin	137.382	1,27
Ciawi	119.135	0,98
Cisarua	132.429	1,10
Megamendung	110.769	0,89
Sukaraja	219.532	1,67
Babakan Madang	118.805	0,96
Sukamakmur	89.738	1,28
Cariu	53.590	1,00
Tanjungsari	59.664	1,21
Jonggol	151.637	1,48
Cileungsi	304.747	1,49
Klapanunggal	142.166	2,93
Gunung Putri	296.424	-0,15
Citeureup	220.094	0,67
Cibinong	376.697	0,96
Bojonggede	308.435	1,89
Tajurhalang	134.642	2,34
Kemang	109.526	1,16
Rancabungur	65.058	1,86
Parung	126.712	0,78
Ciseeng	115.141	1,08
Gunung Sindur	136.712	2,02
Rumpin	152.255	1,12
Cigudeg	140.209	1,23
Sukajaya	71.464	1,77
Jasinga	111.348	1,23
Tenjo	75.838	0,92
Parung Panjang	120.823	0,59
<b>Bogor</b>	<b>5.682.303</b>	<b>1,23</b>

Sumber: Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2025 (BPS, 2025).

Diketahui bahwa penduduk Kabupaten Bogor menuju ke arah penduduk usia produktif. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun dan 15-64 tahun yang mendominasi kelompok usia lainnya. Jika dilihat data pada Gambar 2.18, komposisi penduduk Kabupaten Bogor terdiri dari kelompok usia 0-14 tahun sebesar 24,42 persen, kelompok usia 15-64 tahun sebesar 70,79 persen dan kelompok usia >65 tahun sebesar 4,78 persen. Kondisi tersebut menggambarkan besarnya jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 15-64 tahun yang dapat berimplikasi terhadap masalah ketenagakerjaan, baik untuk saat ini maupun di kemudian hari.

Diketahui bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebesar 34,99 persen, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 6,26 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 41,26 persen (34,50 persen + 6,76 persen). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bogor harus menanggung sebanyak 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Komposisi penduduk Kabupaten Bogor didominasi oleh penduduk usia kerja (15–64 tahun) yang mencapai 70,76 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Bogor didominasi oleh penduduk usia kerja (15–64 tahun) yang mencapai 70,76 persen. Dilihat dari sisi ketenagakerjaan, lebih dari setengah penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja adalah seorang laki-laki. Hal serupa juga terjadi pada penduduk Kabupaten Bogor yang jenis kegiatan selama seminggu terakhirnya adalah pengangguran terbuka. Kemudian dari segi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lebih dari seperempat angkatan kerja di Kabupaten Bogor merupakan lulusan SMA/ sederajat.

Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. APM pada jenjang pendidikan SD/ MI sebesar

97,48, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 85,01, APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 52,05. APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 102,78, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 99,75, APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 74,05.

Tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah dapat terlihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan memiliki angka kesakitan yang tinggi mengindikasikan rendahnya kondisi kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Persentase penduduk Kabupaten Bogor yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir sebesar 28,81 persen. Pada tahun 2024, di Kabupaten terdapat 27 rumah sakit umum dan 4 rumah sakit khusus.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Bogor berasal dari kegiatan pencacahan Susenas Maret Jumlah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2024 mencapai 446.790 orang (7,05 persen) berkurang sebanyak 6.900 orang jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 453.760 orang (7,27 persen). Garis Kemiskinan pada 2024 sebesar Rp. 513.512. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten

Bogor tahun 2024 mencapai 73,63, meningkat dibandingkan dengan IPM tahun 2023 sebesar 73,02.

Berdasarkan data pada Kabupaten Bogor Dalam Angka 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 311.713 miliar, dengan laju pertumbuhan 5,21 persen. Lapangan usaha pertanian telah memberikan kontribusi sebesar 16,1% dari PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2024 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Diketahui bahwa PDRB ADHB Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari Rp235,89 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp311,71 triliun pada tahun 2024. Ini mencerminkan kenaikan sebesar Rp75,82 triliun atau sekitar 32,13% dalam lima tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi nominal, termasuk pengaruh inflasi dan perubahan harga. PDRB ADHK juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dari Rp154,11 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp185,88 triliun pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan sebesar Rp31,77 triliun atau sekitar 20,62%, yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil.

Sektor industri berkontribusi sebesar 51,65 persen terhadap total PDRB Kabupaten Bogor, menjadikannya sektor dominan dalam perekonomian daerah ini. Selain itu, sektor ini terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor mencerminkan dinamika ekonomi yang positif, didukung oleh kontribusi signifikan dari sektor pertanian dan sektor sektor lainnya.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bogor menunjukkan pertumbuhan investasi dalam negeri yang sangat substansial dari tahun 2017 hingga 2023, dengan total investasi melonjak dari Rp 1.835.425.900.000 menjadi Rp 15.136.315.019.392. Peningkatan ini menunjukkan daya tarik

Kabupaten Bogor sebagai tujuan investasi. Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, Industri Makanan, dan Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi menjadi pendorong utama pertumbuhan investasi ini, secara konsisten menyumbang nilai investasi yang besar atau mengalami lonjakan signifikan dalam periode tersebut. Di sisi lain, beberapa sektor seperti Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, dan Perikanan menunjukkan nilai investasi yang lebih rendah atau tidak konsisten, mengindikasikan bahwa investasi belum merata di semua sektor.

Pada tahun 2023, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor mengalami penurunan di angka 5,19 persen. Hal ini seiring dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Penurunan di tahun 2023 tidak terjadi di 8 Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Indramayu, Subang, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar yang mengalami peningkatan. Tahun 2024, Pertumbuhan Kabupaten Bogor tahun 2024 dengan 5,21 persen berada di atas rata-rata provinsi, dan cukup kompetitif jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Stabilitas pertumbuhan menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di sektor-sektor strategis seperti perdagangan, konstruksi, dan jasa. Laju yang berada di atas Provinsi Jawa Barat, menunjukkan ketahanan ekonomi dan arah pemulihan yang positif, meskipun tetap perlu dilakukan penguatan sektor-sektor strategis agar laju pertumbuhan bisa lebih cepat dan merata.

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil pembagian antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita dijadikan indikator yang paling umum digunakan untuk menggambarkan ukuran standar hidup dan tingkat kemakmuran di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Selain itu, PDRB per kapita juga dapat dijadikan pendekatan untuk

indikator pendapatan per kapita, karena angka PDRB per kapita menunjukkan angka pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Namun demikian, tidak seluruh pendapatan tersebut dinikmati oleh penduduk suatu daerah, tetapi ada juga sebagian yang dibawa oleh penduduk daerah lain.

Pada periode 2019-2022, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencapai 18,92 persen dengan nilai peningkatan sebesar 3,52 juta rupiah. Sedangkan untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2019-2023, tingkat pertumbuhannya mencapai 23,66 persen dengan nilai peningkatan sebesar 9,59 juta rupiah. Terlihat tren peningkatan yang stabil pada PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2024 yang merupakan kenaikan tertinggi yaitu sebesar 2,48 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya (dari 30,23 juta menjadi 32,71 juta), atau tumbuh sekitar 8,2%. PDRB per kapita atas dasar harga konstan maupun berlaku Kabupaten Bogor menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif selama lima tahun terakhir. Capaian ini mengindikasikan kemajuan ekonomi daerah dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi. Semakin tinggi nilai indeks gini menunjukkan semakin timpang pendapatan masyarakat. Jika dihitung perkembangan capaian indeks gini tahun 2020-2024, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan indeks gini yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 0,029 poin menjadi 0,398 poin. Hal ini berbeda dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang mengalami penurunan di tahun 2024. Ketimpangan di Kabupaten Bogor yang lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa perbaikan distribusi ekonomi lokal di Bogor mungkin terjadi, meski tidak terjadi di provinsi secara keseluruhan. Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan diperlukan kebijakan pemerataan akses ekonomi, terutama pendidikan dan pekerjaan di wilayah non perkotaan.

## V. ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK

### A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk

Berdasarkan data Susenas Tahun 2024 secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor sudah cukup tinggi. Sebagaimana disajikan pada Tabel V.A.1 data Susenas menunjukkan bahwa kelompok pangan yang dikonsumsi penduduk di Kabupaten Bogor dalam jumlah yang relatif banyak dalam satuan berat secara berturut-turut adalah kelompok padi-padian, pangan hewani, serta sayur & buah. Sementara itu, kelompok pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, dan gula dikonsumsi dalam jumlah yang relatif sedikit. Buah/biji berminyak merupakan kelompok pangan yang dikonsumsi dalam jumlah yang paling sedikit.

Tabel V.A.1. Situasi Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		gram/hari	kg/tahun	Jenis Pangan	kg/tahun
1.	Padi-padian	293,8	117,3	Beras	88,2
2.	Umbi-umbian	37,2	18,1	Singkong	8,2
3.	Pangan Hewani	106,1	43,4	Ikan	15,2
4.	Minyak dan Lemak	28,4	10,8	Minyak Sawit	9,3
5.	Buah/Biji Berminyak	0,9	0,4	Kemiri	0,2
6.	Kacang-kacangan	33,5	11,8	Kacang Kedelai	11,6
7.	Gula	10,0	4,5	Gula Pasir	3,4
8.	Sayur dan Buah	213,0	80,8	Sayur	45,4
9.	Lain-lain	83,4	28,6	Minuman	27,3

Keterangan: \*) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2024

Data yang lebih terperinci tentang rata-rata konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 dalam satuan berat per kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 1. Data yang disajikan pada lampiran tersebut sebagaimana diringkas pada Tabel V.A.1 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya dalam satuan berat, jenis-

jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 berturut-turut untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (88,2 kg/kapita/tahun) pada kelompok padi-padian, singkong (8,2 kg/kapita/tahun) untuk kelompok umbi-umbian, ikan (15,2 kg/kapita/tahun) untuk kelompok pangan hewani, minyak sawit (9,3 kg/kapita/tahun) untuk kelompok minyak dan lemak, kemiri (0,2 kg/kapita/tahun) untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang kedelai (11,6 kg/kapita/tahun) untuk kelompok kacang-kacangan, gula pasir (3,4 kg/kapita/tahun) untuk kelompok gula, sayur (45,4 kg/kapita/tahun) untuk kelompok sayur dan buah, dan minuman (27,3 kg/kapita/tahun) untuk kelompok lain-lain.

## **B. Konsumsi dan Kecukupan Gizi**

Gambaran jumlah dalam satuan berat pangan yang dikonsumsi penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana dibahas pada sub-bab pola konsumsi pangan belum dapat menggambarkan besarnya capaian kontribusi pangan sebagai sumber zat gizi, sehingga tidak cukup menjadi ukuran untuk menganalisis capaian kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan penduduk. Oleh itu perlu dianalisis lebih jauh capaian kontribusi gizi, masing-masing kelompok maupun jenis pangan.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.1 terlihat bahwa kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor tahun 2024 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 1.170 kkal/kapita/hari (58,8 %). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi energi yang signifikan adalah minyak & lemak sekitar 254 kkal/kapita/hari (12,8 %) dan pangan hewani sekitar 242 kkal/kapita/hari (12,2 %). Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi energinya relatif kecil.

Tabel V.B.1. Kontribusi Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		kkal/kap/hari	%	Jenis Pangan	kkal/kap/hari
1.	Padi-padian	1.170	58,8	Beras	871,3
2.	Umbi-umbian	42	2,1	Singkong	27,9
3.	Pangan Hewani	242	12,2	Daging Unggas	79,7
4.	Minyak dan Lemak	254	12,8	Minyak Sawit	230,7
5.	Buah/Biji Berminyak	6	0,3	Kemiri	4,1
6.	Kacang-kacangan	64	3,2	Kacang Kedelai	59,1
7.	Gula	38	1,9	Gula Pasir	34,8
8.	Sayur dan Buah	109	5,5	Sayur	58,0
9.	Lain-lain	66	3,3	Minuman	61,1
Total		1.991	100,0		

Keterangan: \*) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2024

Secara umum data yang disajikan pada Tabel V.B.1 lebih jauh menunjukkan bahwa hampir sejalan dengan pola konsumsi pangannya, jenis-jenis pangan yang paling banyak menyumbang energi pada konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (871,0 kkal/kapita/hari) pada kelompok padi-padian, singkong (27,9 kkal/kapita/hari) pada kelompok umbi-umbian, daging unggas (79,7 kkal/kapita/hari) untuk kelompok pangan hewani, minyak sawit (230,7 kkal/kapita/hari) untuk kelompok minyak dan lemak, kemiri (4,1 kkal/kapita/hari) untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang kedelai (59,1 kkal/kapita/hari) untuk kelompok kacang-kacangan, gula pasir (34,8 kkal/kapita/hari) untuk kelompok gula, buah (58,0 kkal/kapita/hari) untuk kelompok sayur dan buah, dan minuman (61,1 kkal/kapita/hari) untuk kelompok lain-lain. Data yang lebih terperinci tentang rata-rata kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 per kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Sementara itu, data yang disajikan pada Tabel V.B.2 menunjukkan bahwa kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2024 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 26,7 gram/kapita/hari (45,5 %). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi protein yang signifikan

adalah pangan hewani sekitar 20,9 gram/kapita/hari (35,7 %) dan kacang-kacangan sekitar 5,4 gram/kapita/hari (9,1 %). Sementara kelompok umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta lain-lain memiliki kontribusi protein yang sangat kecil dibandingkan kelompok padi-padian, pangan hewani dan kacang-kacangan.

Tabel V.B.2. Kontribusi Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.

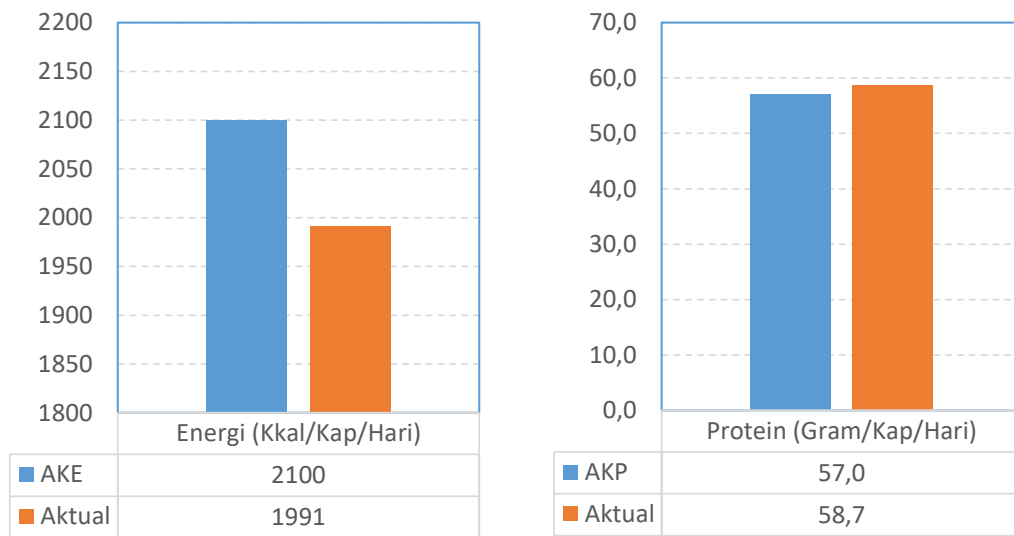
No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		gram/kap/hari	%	Jenis Pangan	gram/kap/hari
1.	Padi-padian	26,7	45,5	Beras	20,5
2.	Umbi-umbian	0,4	0,7	Singkong	0,2
3.	Pangan Hewani	20,9	35,7	Ikan	8,5
4.	Minyak dan Lemak	0,0	0,1	Minyak Sawit	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,1	0,2	Kemiri	0,1
6.	Kacang-kacangan	5,4	9,1	Kacang Kedelai	5,0
7.	Gula	0,0	0,1	Gula Pasir	0,0
8.	Sayur dan Buah	3,7	6,4	Sayur	2,8
9.	Lain-lain	1,3	2,3	Minuman	1,1
Total		58,7	100		

Keterangan: \*) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2024

Lebih jauh data yang disajikan pada Tabel V.B.2 menunjukkan pula bahwa jenis-jenis pangan yang paling banyak menyumbang protein pada konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (20,5 gram/kapita/hari) pada kelompok padi-padian, ikan (8,5 gram/kapita/hari) untuk kelompok pangan hewani, dan kacang kedelai (5,0 gram/kapita/hari) untuk kelompok kacang-kacangan. Data yang lebih terperinci tentang rata-rata kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menurut kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Data yang disajikan pada Gambar V.B.1 menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan

penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2024 adalah sekitar 1991 kkal/kapita/hari. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor belum memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berdasarkan WNPNG Tahun 2018 sebesar 2.100 Kkal/kapita/hari. Sementara itu, asupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor sudah mencapai sebesar 58,7 gram/kapita/hari.



Gambar V.B.1. Asupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berarti Tingkat Kecukupan Energi (TKE) konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor hanya mencapai sekitar 96,4 %AKE pada tahun 2024. Sementara itu, Tingkat Kecukupan Protein (TKP) konsumsinya mencapai 102,9 %AKP. Tingkat kecukupan energi dan protein untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan data Susenas tahun 2024 disajikan pada Tabel V.B.3.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.3 terlihat juga bahwa kecukupan energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 paling banyak diperoleh dari kelompok

padi-padian, yaitu sekitar 1.170 kkal/kapita/hari (55,7 %AKE). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi energi yang signifikan adalah minyak & lemak sekitar 254 kkal/kapita/hari (12,1 %AKE) dan pangan hewani sekitar 242 kkal/kapita/hari (11,5 %AKE) dan. Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi energinya relatif kecil.

Tabel V.B.3. Capaian Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024.

No	Kelompok Pangan	Energi		Protein	
		kkal/kap/hari	%AKE	gr/kap/hari	%AKP
1.	Padi-padian	1.170	55,7	26,7	46,8
2.	Umbi-umbian	42	2,0	0,4	0,7
3.	Pangan Hewani	242	11,5	20,9	36,7
4.	Minyak dan Lemak	254	12,1	0,0	0,1
5.	Buah/Biji Berminyak	6	0,3	0,1	0,2
6.	Kacang-kacangan	64	3,0	5,4	9,4
7.	Gula	38	1,8	0,0	0,1
8.	Sayur dan Buah	109	5,2	3,7	6,5
9.	Lain-lain	66	3,1	1,3	2,4
Total		1.991	94,8	58,7	102,9

Keterangan: \*) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2024

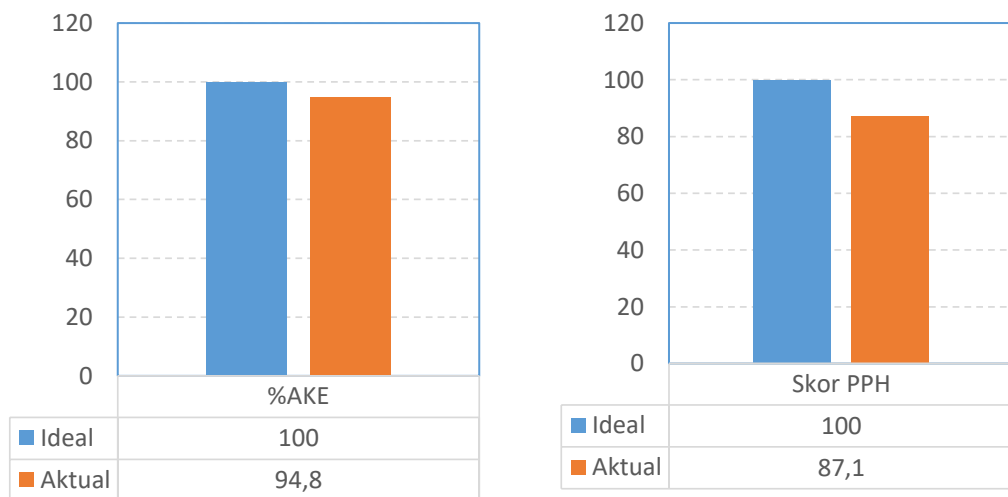
\*\*) Standar AKE sebesar 2100 kkal/Kap/Hari dan AKP sebesar 57 gr/kap/hari

Sementara itu, asupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 mencapai 58,7 gram/kapita/hari. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor sudah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan secara nasional berdasarkan WNPG Tahun 2018 sebesar 57 gram/kapita/hari. Tingkat Kecukupan Protein (TKP) konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor tahun 2024 mencapai 102,9 %AKP. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.3 tersebut terlihat juga bahwa kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 paling banyak

diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 29,1 gram/kapita/hari (51,1 %AKP) dan pangan hewani sekitar 23,2 gram/kapita/hari (40,7 %AKP). Sementara kelompok kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati hanya menyumbang sekitar 5,9 gram/kapita/hari (10,4 %AKP).

### C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Capaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah tidak cukup hanya didasarkan pada hasil analisis capaian konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh terpenuhinya atau tidaknya kuantitas kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan terhadap kualitas kecukupan gizi, khususnya dinilai dari aspek komposisi atau keragaman dan mutu gizi konsumsi pangan penduduk. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis kualitas konsumsi pangan berdasarkan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) yang didasarkan pada kontribusi kecukupan konsumsi energi masing-masing kelompok pangan.



Gambar V.C.1. Tingkat Kecukupan Energi dan dan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Hasil analisis kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2024 menunjukkan bahwa selain kuantitas konsumsi pangan berdasarkan kecukupan energi yang

masih dibawah angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas konsumsi pangannya juga belum mencapai pola pangan yang ideal ideal. Sebagaimana disajikan pada Gambar V.C.1 skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2024 baru mencapai 87,1 atau masih kurang 12,9 poin dari skor PPH ideal 100. Data yang disajikan pada Tabel V.C.1 menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok pangan belum mencapai skor idealnya kecuali untuk kelompok padi-padian serta minyak dan lemak.

Tabel V.C.1. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		kcal	%AKE*)	Bobot	Skor	Skor AKE	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.170	55,7	0,5	25,0	27,9	25,0
2.	Umbi-umbian	42	2,0	0,5	2,5	1,0	1,0
3.	Pangan Hewani	242	11,5	2,0	24,0	23,1	23,1
4.	Minyak dan Lemak	254	12,1	0,5	5,0	6,1	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	6	0,3	0,5	1,0	0,1	0,1
6.	Kacang-kacangan	64	3,0	2,0	10,0	6,1	6,1
7.	Gula	38	1,8	0,5	2,5	0,9	0,9
8.	Sayur dan Buah	109	5,2	5,0	30,0	25,9	25,9
9.	Lain-lain	66	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.991	94,8		100,0		87,1

Keterangan: \*) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2024

\*\*) Dihitung berdasarkan standar AKE sebesar 2100 kkal/Kap/Hari dan standar PPH Nasional

#### D. Gap Situasi Konsumsi Pangan

Masih belum berimbangny kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana telah dibahas pada

sub-bab sebelumnya berdampak pada rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor. Gap analisis situasi konsumsi pangan aktual dengan standar ideal cukup memadai sebagai dasar analisis sasaran konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor.

Tabel V.D.1. Gap Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita/Hari		Standar Ideal**)		Gap	
		%AKE*)	Skor PPH	%AKE	Skor PPH	%AKE	Skor PPH
1.	Padi-padian	55,7	25,0	50,0	25,0	5,7	0,0
2.	Umbi-umbian	2,0	1,0	6,0	2,5	-4,0	-1,5
3.	Pangan Hewani	11,5	23,1	12,0	24,0	-0,5	-0,9
4.	Minyak dan Lemak	12,1	5,0	10,0	5,0	2,1	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,3	0,1	3,0	1,0	-2,7	-0,9
6.	Kacang-kacangan	3,0	6,1	5,0	10,0	-2,0	-3,9
7.	Gula	1,8	0,9	5,0	2,5	-3,2	-1,6
8.	Sayur dan Buah	5,2	25,9	6,0	30,0	-0,8	-4,1
9.	Lain-lain	3,1	0,0	3,0	0,0	0,1	0,0
		94,8	87,1	100,0	100,0	-5,2	-12,9

Keterangan: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 kkal/kapita/hari

\*\*) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian serta minyak dan lemak. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.D.1 dan V.D.2 secara umum dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan pola konsumsinya, maka kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor untuk semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola pangan yang sesuai dengan standar PPH ideal.

Tabel V.D.2. Gap Kontribusi Kecukupan Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita/Hari		Standar Ideal*)		Gap	
		Energi (kkal)	%AKE	Energi (kkal)	%AKE	Energi (kkal)	%AKE
1.	Padi-padian	1.170	55,7	1.050	50,0	120	5,7
2.	Umbi-umbian	42	2,0	126	6,0	-84	-4,0
3.	Pangan Hewani	242	11,5	252	12,0	-10	-0,5
4.	Minyak dan Lemak	254	12,1	210	10,0	44	2,1
5.	Buah/Biji Berminyak	6	0,3	63	3,0	-57	-2,7
6.	Kacang-kacangan	64	3,0	105	5,0	-41	-2,0
7.	Gula	38	1,8	105	5,0	-67	-3,2
8.	Sayur dan Buah	109	5,2	126	6,0	-17	-0,8
9.	Lain-lain	66	3,1	63	3,0	3	0,1
		1.991	94,8	2.100	100,0	-109	-5,2

Keterangan: \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari

Sejalan dengan pola kontribusi energinya, maka berat pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di wilayah Kabupaten Bogor untuk semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola konsumsi pangan sesuai standar PPH ideal. Data yang disajikan pada Tabel V.D.3 menyajikan perbandingan atau gap antara estimasi rata-rata berat konsumsi per kelompok pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor tahun 2024 dengan estimasi ideal berat konsumsi pangan masing-masing kelompok pangan berdasarkan standar PPH Nasional dengan AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari.

Mengacu pada data hasil harmonisasi analisis PPH berdasarkan data Susenas tahun 2024, secara umum konsumsi pangan penduduk per kapita di Wilayah Kabupaten Bogor hanya mengalami kelebihan padi-padian sebanyak 5,1 gram/hari atau 1,8 kg/tahun, minyak dan lemak sekitar 2,1 gram/hari atau 0,8 kg/tahun, dan kelompok lain-lain sekitar 67,6 gram/hari atau 24,7 kg/tahun. Sementara itu konsumsi pangan penduduk

per kapita untuk kelompok umbi-umbian mengalami defisit yang sangat signifikan, yaitu masing-masing sekitar 57,3 gram/hari atau 20,9 kg/tahun.

Tabel V.D.3. Gap Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita		Estimasi Ideal Per Kapita		Gap	
		gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun
1.	Padi-padian	294	107,2	289	105,4	5,1	1,8
2.	Umbi-umbian	37	13,6	95	34,5	-57,3	-20,9
3.	Pangan Hewani	106	38,7	147	53,7	-40,9	-14,9
4.	Minyak dan Lemak	28	10,4	26	9,6	2,1	0,8
5.	Buah/Biji Berminyak	1	0,3	11	3,8	-9,6	-3,5
6.	Kacang-kacangan	34	12,2	37	13,4	-3,2	-1,2
7.	Gula	10	3,7	32	11,5	-21,5	-7,8
8.	Sayur dan Buah	213	77,7	242	88,1	-28,5	-10,4
9.	Lain-lain	83	30,4	16	5,7	67,6	24,7

*Keterangan: Estimasi berdasarkan konversi konsumsi energi masing-masing kelompok pangan menjadi berat konsumsi pangan dalam gram/kapita/hari dengan standar AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari*

Demikian pula untuk kelompok pangan hewani yang masih mengalami defisit sekitar 40,9 gram/kapita/hari atau 14,9 kg/kapita/tahun, gula yang masih mengalami defisit sekitar 21,5 gram/kapita/hari atau 7,8 kg/kapita/tahun serta sayur dan buah yang defisit sekitar 28,5 gram/kapita/hari atau 10,4 kg/kapita/tahun. Sementara untuk kelompok buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan masih juga mengalami defisit sekitar 3-10 gram/kapita/hari atau 1-4 kg/kapita/tahun.

## VI. ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN

### A. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk

Analisis kebutuhan konsumsi pangan penduduk untuk mencapai sasaran skor PPH pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan strategi penyediaan kebutuhan pangan wilayah. Selain informasi tentang kelompok jenis pangan apa saja yang masih perlu ditingkatkan, hasil analisis tersebut juga dapat menjadi acuan estimasi tingkat pertumbuhan yang diperlukan agar target tersebut dapat dicapai.

Tabel VI.A.1. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Capaian Per Kapita		Ideal Per Kapita		Gap Per Tahun		
		gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	%
1.	Padi-padian	323,2	118,0	290,0	105,8	33,2	12,1	11,4
2.	Umbi-umbian	40,9	14,9	122,0	44,5	-81,2	-29,6	-66,5
3.	Pangan Hewani	116,7	42,6	121,4	44,3	-4,7	-1,7	-3,9
4.	Minyak dan Lemak	31,2	11,4	25,7	9,4	5,5	2,0	21,2
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,4	11,5	4,2	-10,4	-3,8	-90,9
6.	Kacang-kacangan	36,9	13,5	60,6	22,1	-23,7	-8,6	-39,1
7.	Gula	11,0	4,0	30,8	11,2	-19,8	-7,2	-64,2
8.	Sayur dan Buah	234,3	85,5	271,1	98,9	-36,8	-13,4	-13,6
9.	Lain-lain	91,7	33,5	87,5	31,9	4,2	1,5	4,8

*Keterangan: Estimasi kebutuhan pangan pada setiap kelompok didasarkan pada rata-rata perkapita konsumsi pangan penduduk ditambah 10%*

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan ideal per jenis pangan didasarkan pada persen energi suatu jenis pangan pada kelompok pangan masing-masing dikalikan jumlah energi ideal untuk tiap kelompok dengan asumsi kontribusi antar jenis pangan dalam suatu kelompok tidak berubah. Estimasi berat pangan ideal untuk suatu jenis pangan diperoleh dari hasil konversi estimasi jumlah energi ideal yang berasal dari suatu jenis pangan

kedalam berat pangan jenis pangan tersebut. Jumlah kebutuhan konsumsi pangan penduduk tersebut didasarkan pada angka hasil proyeksi konsumsi pangan berdasarkan sasaran skor PPH) ditambah 10 %.

Hasil analisis data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan data Susenas Tahun 2024 menunjukkan bahwa estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor belum optimal. Sebagaimana disajikan pada Tabel VI.A.1 kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhannya telah melebihi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanya padi-padian (118,0 kg/kapita), minyak & lemak (31,9 kg/kapita), dan kelompok lain-lain (91,7 kg/kapita). Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah belum memenuhi estimasi idealnya.

Jika dibandingkan dengan estimasi ideal kebutuhannya maka konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 masih kekurangan pangan kelompok umbi-umbian (29,6 kg/kapita), pangan hewani (1,7 kg/kapita), buah/biji berminyak (3,8 kg/kapita), kacang-kacangan (8,6 kg/kapita), gula (7,2 kg/kapita), serta kelompok sayur dan buah (13,4 kg/kapita). Data lebih detail tentang gap konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4.

## **B. Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah**

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah tahun tertentu dapat dihitung berdasarkan perkalian rata-rata kebutuhan konsumsi pangan penduduk (kg/kapita/tahun) dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Oleh karena itu, realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayah di Kabupaten Bogor tahun 2024 secara umum akan menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk perkapita pada tahun yang sama. Jumlah penduduk Kabupaten

Bogor pada tahun 2024 sebanyak 5.682.303 jiwa. Berdasarkan data Tabel VI.B.1, kelompok pangan yang realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayahnya telah melebihi estimasi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah kelompok padi-padian (670,3 ribu ton), pangan hewani (242,0 ribu ton), dan lain-lain (190,2 ribu ton) per tahun.

Tabel VI.B.1. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah di Kabupaten Bogor Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Capaian Per Tahun		Ideal Per Tahun		Gap Per Tahun		
		kg/kapita	Ribu Ton	kg/kapita	Ribu Ton	kg/kapita	Ribu Ton	%
1.	Padi-padian	118,0	670,3	105,8	601,4	12,1	68,9	11,4
2.	Umbi-umbian	14,9	84,8	44,5	253,1	-29,6	-168,4	-66,5
3.	Pangan Hewani	42,6	242,0	44,3	251,8	-1,7	-9,8	-3,9
4.	Minyak dan Lemak	11,4	64,7	9,4	53,4	2,0	11,3	21,2
5.	Buah/Biji Berminyak	0,4	2,2	4,2	23,8	-3,8	-21,7	-90,9
6.	Kacang-kacangan	13,5	76,5	22,1	125,7	-8,6	-49,1	-39,1
7.	Gula	4,0	22,8	11,2	63,8	-7,2	-41,0	-64,2
8.	Sayur dan Buah	85,5	485,9	98,9	562,2	-13,4	-76,3	-13,6
9.	Lain-lain	33,5	190,2	31,9	181,4	1,5	8,8	4,8

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.B.1 lebih jauh terlihat bahwa untuk dapat mencapai estimasi ideal total kebutuhan konsumsi pangan wilayah di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 masih kekurangan pangan kelompok umbi-umbian (168,4 ribu ton), pangan hewani (9,8 ribu ton), buah/biji berminyak (21,7 ribu ton), kacang-kacangan (49,1 ribu ton), gula (41,0 ribu ton), serta sayur dan buah (76,3 ribu ton). Data lebih detail tentang estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4.

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan berat pangan yang dikonsumsi secara umum kuantitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2024 masih kurang dari estimasi idealnya pada sebagian besar kelompok pangan kecuali pada kelompok padi-padian, pangan hewani dan lain-lain. Total asupan energi konsumsi pangannya hanya mencapai 1.991 kkal/kapita/hari (94,6 %AKE). Adapun total asupan protein konsumsi pangannya mencapai 58,7 gram/kapita/hari (112,4 %AKP). Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor belum cukup yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi yang masih kurang dari 100 %AKE. Demikian pula secara kualitas, konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2024 baru mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,1 yang berarti masih kurang 12,9 poin jika dibandingkan skor PPH ideal sebesar 100.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor menurut data Susenas Tahun 2024 terlihat bahwa estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor belum optimal. Kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhannya melebihi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah hanya padi-padian (118,0 kg/kapita), minyak & lemak (31,9 kg/kapita), dan kelompok lain-lain (91,7 kg/kapita). Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah belum memenuhi estimasi idealnya. Jika dibandingkan dengan estimasi ideal kebutuhannya maka konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 masih kekurangan pangan kelompok umbi-umbian (29,6 kg/kapita), pangan hewani (1,7 kg/kapita), buah/biji berminyak (3,8 kg/kapita), kacang-kacangan (8,6 kg/kapita), gula (7,2 kg/kapita), serta kelompok sayur dan buah (13,4 kg/kapita).

Secara umum, capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayah di Kabupaten Bogor tahun 2024 menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduknya. Kelompok pangan yang realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayah telah melebihi estimasi idealnya hanyalah kelompok padi-padian (670,3 ribu ton), pangan hewani (242,0 ribu ton), dan lain-lain (190,2 ribu ton) per tahun. Untuk dapat mencapai estimasi ideal total kebutuhan konsumsi pangan wilayah di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 masih kekurangan pangan kelompok umbi-umbian (168,4 ribu ton), pangan hewani (9,8 ribu ton), buah/biji berminyak (21,7 ribu ton), kacang-kacangan (49,1 ribu ton), gula (41,0 ribu ton), serta sayur dan buah (76,3 ribu ton).

## **B. Saran**

Informasi dasar tentang capaian situasi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder terkait pembangunan ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Bogor pada setiap tahapan dan proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil kajian Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor. Dengan dukungan data dan informasi dari hasil kajian ini diharapkan sinergisitas kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan ketahanan pangan, khususnya di bidang konsumsi pangan, di wilayah Kabupaten Bogor dapat lebih dioptimalkan.

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan berdasarkan data Susenas ini baru mempertimbangkan kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk di tingkat rumahtangga. Oleh karena itu, untuk menghitung kebutuhan

konsumsi pangan secara keseluruhan perlu ditambah lagi dengan estimasi konsumsi pangan penduduk di luar rumahtangga, khususnya di rumahsakit, hotel dan restoran, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengestimasi lebih jauh tentang total kebutuhan pangan wilayah harus pula mempertimbangkan kebutuhan pangan wilayah untuk non konsumsi penduduk, seperti : industri, energi alternatif, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis tentang kebutuhan pangan akan lebih komprehensif, sehingga dapat mencakup kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk didalam dan diluar rumahtangga maupun untuk kebutuhan lainnya.

Agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor dimasa mendatang, maka perlu dilakukan analisis situasi yang paling tidak mencakup data periode terakhir RPJMD Kabupaten Bogor. Dengan demikian dapat dilakukan analisis tren pertumbuhan pada indikator pokok situasi konsumsi pangan. Hasil analisis tren pertumbuhan tersebut merupakan salah satu faktor utama yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam analisis sasaran konsumsi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan periode RPJMD berikutnya.

Hasil analisis sasaran konsumsi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan tersebut perlu disinergiskan pula dengan hasil analisis ketersediaan pangan wilayah. Berdasarkan hasil analisis awal tentang capaian pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan serta ketersediaan pangan wilayah tersebut, maka dapat dilakukan kajian lebih lanjut tentang analisis penyediaan pangan wilayah. Pada analisis tahap ini fokus kajian sudah mensinergiskan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dengan potensi dan daya dukung wilayah, baik potensi agroekologi maupun sosial ekonomi.

Mengingat saat ini merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, maka diperlukan pula kajian lebih

komprehensif untuk menyusun naskah akademik roadmap pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2025-2045. Oleh karena itu perl dilengkapi dengan kajian mendalam tentang preferensi pangan penduduk melalui survei konsumsi pangan mandiri untuk menggali lebih jauh berbagai faktor determinan berperan dalam membentuk pola konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan demikian, diharapkan dapat disusun berbagai strategi dan alternatif program ketahanan pangan yang efektif dan efisien pada berbagai tingkat sasaran mulai dari tingkat individu, rumahtangga dan wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2025. Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2025 Volume 42 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2025. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bogor Menurut Pengeluaran 2020-2024 Volume 10 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2024. Statistik Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Volume 10 Tahun 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Bogor.
- Kabupaten Bogor. 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bogor. Bogor.
- Kabupaten Bogor. 2024. Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 500.1/886/Kpts/Per-UU/2024 Tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2024.
- Badan Pangan Nasional. 2024. Pedoman Penilaian Skor Pola Pangan Harapan. Badan Pangan Nasional. Jakarta.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. 2024. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Bogor.
- Kusumaningrum SP, Syaukat Y, Firdaus M. 2021 Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen Agribisnis Volume 9 Nomor 2, Oktober 2021.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Kabupaten Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2024

Kelompok dan Jenis Pangan	Berat Konsumsi Per Kapita		
	Gram/Hari	Kg/Tahun	%
1. Padi-Padian			
Beras	241,7	88,2	82,3
Jagung	1,4	0,5	0,5
Terigu	50,6	18,5	17,2
Subtotal	293,8	107,2	100,0
2. Umbi-umbian			
Singkong	22,5	8,2	60,6
Ubi Jalar	6,3	2,3	17,0
Sagu	7,4	2,7	20,0
Kentang	0,3	0,1	0,8
Umbi Lainnya	0,6	0,2	1,6
Subtotal	37,2	13,6	100,0
3. Pangan Hewani			
Daging Ruminansia	10,4	3,8	9,8
Daging Unggas	26,1	9,5	24,6
Telur	21,8	8,0	20,6
Susu	6,2	2,3	5,8
Ikan	41,5	15,2	39,2
Subtotal	106,1	38,7	100,0
4. Minyak dan Lemak			
Minyak Kelapa	1,7	0,6	6,0
Minyak Lainnya	25,6	9,3	90,2
Margarin	1,1	0,4	3,9
Subtotal	28,4	10,4	100,0
5. Buah/Biji Berminyak			
Kelapa	0,3	0,1	31,8
Kemiri	0,6	0,2	68,2
Subtotal	0,9	0,3	100,0
6. Kacang-kacangan			
Kacang Kedelai	31,8	11,6	94,8
Kacang Tanah	0,5	0,2	1,6
Kacang Hijau	1,0	0,4	3,1
Kacang lain	0,2	0,1	0,5
Subtotal	33,5	12,2	100,0
7. Gula			
Gula Pasir	9,3	3,4	92,6
Gula Merah	0,7	0,3	7,4
Subtotal	10,0	3,7	100,0
8. Sayur dan Buah			
Sayur	124,5	45,4	58,5
Buah	88,5	32,3	41,5
Subtotal	213,0	77,7	100,0
9. Lain-lain			
Minuman	74,9	27,3	89,9
Bumbu	8,4	3,1	10,1
Subtotal	83,4	30,4	100,0

Lampiran 2. Kontribusi Gizi Konsumsi Pangan Penduduk di Kabupaten Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2024

Kelompok dan Jenis Pangan	Kontribusi Energi		Kontribusi Protein	
	Kkal/Kap/Hari	%	Gram/Kap/Hari	%
1. Padi-Padian				
Beras	871,3	74,5	20,5	76,8
Jagung	1,7	0,1	0,1	0,2
Terigu	297,3	25,4	6,1	23,0
Subtotal	1.170,2	100,0	26,7	100,0
2. Umbi-umbian				
Singkong	27,9	66,1	0,2	48,1
Ubi Jalar	8,7	20,6	0,1	17,9
Sagu	3,9	9,2	0,1	31,4
Kentang	1,1	2,5	0,0	0,5
Umbi Lainnya	0,7	1,6	0,0	2,2
Subtotal	42,2	100,0	0,4	100,0
3. Pangan Hewani				
Daging Ruminansia	58,6	24,2	3,6	17,0
Daging Unggas	79,7	32,9	5,6	26,6
Telur	30,0	12,4	2,4	11,5
Susu	24,9	10,3	0,9	4,3
Ikan	49,1	20,3	8,5	40,6
Subtotal	242,2	100,0	20,9	100,0
4. Minyak dan Lemak				
Minyak Kelapa	14,8	5,8	0,0	47,8
Minyak Lainnya	230,7	90,6	-	-
Margarin	9,1	3,6	0,0	52,2
Subtotal	254,5	100,0	0,0	100,0
5. Buah/Biji Berminyak				
Kelapa	1,6	28,1	0,0	11,0
Kemiri	4,1	71,9	0,1	89,0
Subtotal	5,7	100,0	0,1	100,0
6. Kacang-kacangan				
Kacang Kedelai	59,1	92,4	5,0	94,0
Kacang Tanah	2,4	3,8	0,1	2,5
Kacang Hijau	1,9	2,9	0,2	2,8
Kacang lain	0,5	0,9	0,0	0,7
Subtotal	63,9	100,0	5,4	100,0
7. Gula				
Gula Pasir	34,8	92,6	0,0	55,5
Gula Merah	2,8	7,4	0,0	44,5
Subtotal	37,6	100,0	0,0	100,0
8. Sayur dan Buah				
Sayur	58,0	53,3	2,8	76,3
Buah	50,9	46,7	0,9	23,7
Subtotal	108,9	100,0	3,7	100,0
9. Lain-lain				
Minuman	61,1	92,5	1,1	85,7
Bumbu	4,9	7,5	0,2	14,3
Subtotal	66,0	100,0	1,3	100,0

### Lampiran 3. Gap Konsumsi Pangan Penduduk di Kabupaten Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2024

Kelompok dan Jenis Pangan	Konsumsi Per Kapita		Estimasi Ideal Per Kapita		Gap Konsumsi Per Kapita		
	Gram/Hari	Kg/Tahun	Gram/Hari	Kg/Tahun	Gram/Hari	Kg/Tahun	%
1. Padi-Padian							
Beras	241,7	88,2	216,9	79,2	24,8	9,1	11,4
Jagung	1,4	0,5	1,3	0,5	0,1	0,1	11,4
Terigu	50,6	18,5	45,4	16,6	5,2	1,9	11,4
Subtotal	293,8	107,2	263,6	96,2	30,2	11,0	11,4
2. Umbi-umbian							
Singkong	22,5	8,2	67,3	24,6	(44,7)	(16,3)	(66,5)
Ubi Jalar	6,3	2,3	18,9	6,9	(12,5)	(4,6)	(66,5)
Sagu	7,4	2,7	22,2	8,1	(14,7)	(5,4)	(66,5)
Kentang	0,3	0,1	0,9	0,3	(0,6)	(0,2)	(66,5)
Umbi Lainnya	0,6	0,2	1,7	0,6	(1,2)	(0,4)	(66,5)
Subtotal	37,2	13,6	111,0	40,5	(73,8)	(26,9)	(66,5)
3. Pangan Hewani							
Daging Ruminansia	10,4	3,8	10,8	3,9	(0,4)	(0,2)	(3,9)
Daging Unggas	26,1	9,5	27,2	9,9	(1,1)	(0,4)	(3,9)
Telur	21,8	8,0	22,7	8,3	(0,9)	(0,3)	(3,9)
Susu	6,2	2,3	6,5	2,4	(0,3)	(0,1)	(3,9)
Ikan	41,5	15,2	43,2	15,8	(1,7)	(0,6)	(3,9)
Subtotal	106,1	38,7	110,4	40,3	(4,3)	(1,6)	(3,9)
4. Minyak dan Lemak							
Minyak Kelapa	1,7	0,6	1,4	0,5	0,3	0,1	21,2
Minyak Lainnya	25,6	9,3	21,1	7,7	4,5	1,6	21,2
Margarin	1,1	0,4	0,9	0,3	0,2	0,1	21,2
Subtotal	28,4	10,4	23,4	8,5	5,0	1,8	21,2
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	0,3	0,1	3,3	1,2	(3,0)	(1,1)	(90,9)
Kemiri	0,6	0,2	7,1	2,6	(6,5)	(2,4)	(90,9)
Subtotal	0,9	0,3	10,4	3,8	(9,5)	(3,5)	(90,9)
6. Kacang-kacangan							
Kacang Kedelai	31,8	11,6	52,2	19,1	(20,4)	(7,5)	(39,1)
Kacang Tanah	0,5	0,2	0,9	0,3	(0,3)	(0,1)	(39,1)
Kacang Hijau	1,0	0,4	1,7	0,6	(0,7)	(0,2)	(39,1)
Kacang lain	0,2	0,1	0,3	0,1	(0,1)	(0,0)	(39,1)
Subtotal	33,5	12,2	55,1	20,1	(21,5)	(7,9)	(39,1)
7. Gula							
Gula Pasir	9,3	3,4	25,9	9,5	(16,6)	(6,1)	(64,2)
Gula Merah	0,7	0,3	2,1	0,8	(1,3)	(0,5)	(64,2)
Subtotal	10,0	3,7	28,0	10,2	(18,0)	(6,6)	(64,2)
8. Sayur dan Buah							
Sayur	124,5	45,4	144,1	52,6	(19,6)	(7,1)	(13,6)
Buah	88,5	32,3	102,4	37,4	(13,9)	(5,1)	(13,6)
Subtotal	213,0	77,7	246,4	89,9	(33,5)	(12,2)	(13,6)
9. Lain-lain							
Minuman	74,9	27,3	71,5	26,1	3,5	1,3	4,8
Bumbu	8,4	3,1	8,1	2,9	0,4	0,1	4,8
Subtotal	83,4	30,4	79,5	29,0	3,8	1,4	4,8

Lampiran 4. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2024

Kelompok dan Jenis Pangan	Kebutuhan Per Tahun		Estimasi Ideal Per Tahun		Gap Kebutuhan Konsumsi		
	Kg/Kapita	Ribu Ton	Kg/Tahun	Ribu Ton	Kg/Kapita	Ribu Ton	%
1. Padi-Padian							
Beras	88,2	501,4	88,5	502,9	(0,3)	(1,5)	(0,3)
Jagung	0,5	3,0	0,5	2,7	0,1	0,3	12,1
Terigu	18,5	105,0	17,9	101,9	0,6	3,1	3,1
Subtotal	107,2	609,4	106,9	607,4	0,3	1,9	0,3
2. Umbi-umbian							
Singkong	8,2	46,7	24,9	141,6	(16,7)	(94,9)	(67,0)
Ubi Jalar	2,3	13,1	9,8	55,4	(7,5)	(42,3)	(76,4)
Sagu	2,7	15,4	8,3	47,1	(5,6)	(31,7)	(67,3)
Kentang	0,1	0,7	0,4	2,0	(0,2)	(1,4)	(68,1)
Umbi Lainnya	0,2	1,2	1,3	7,6	(1,1)	(6,4)	(84,2)
Subtotal	13,6	77,1	44,7	253,8	(31,1)	(176,8)	(69,6)
3. Pangan Hewani							
Daging Ruminansia	3,8	21,5	4,1	23,5	(0,4)	(2,0)	(8,6)
Daging Unggas	9,5	54,2	10,4	59,2	(0,9)	(5,0)	(8,5)
Telur	8,0	45,3	9,3	52,9	(1,3)	(7,7)	(14,5)
Susu	2,3	12,9	3,2	18,3	(1,0)	(5,4)	(29,7)
Ikan	15,2	86,2	18,6	105,9	(3,5)	(19,8)	(18,7)
Subtotal	38,7	220,0	45,7	259,9	(7,0)	(39,9)	(15,3)
4. Minyak dan Lemak							
Minyak Kelapa	0,6	3,5	0,7	3,7	(0,0)	(0,2)	(6,1)
Minyak Lainnya	9,3	53,0	8,3	47,0	1,1	6,1	13,0
Margarin	0,4	2,3	0,5	2,8	(0,1)	(0,5)	(18,4)
Subtotal	10,4	58,8	9,4	53,5	0,9	5,3	10,0
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	0,1	0,6	1,9	10,9	(1,8)	(10,3)	(94,3)
Kemiri	0,2	1,3	2,4	13,4	(2,1)	(12,1)	(90,0)
Subtotal	0,3	2,0	4,3	24,3	(3,9)	(22,4)	(91,9)
6. Kacang-kacangan							
Kacang Kedelai	11,6	65,9	18,1	102,6	(6,5)	(36,7)	(35,8)
Kacang Tanah	0,2	1,1	0,6	3,5	(0,4)	(2,4)	(68,7)
Kacang Hijau	0,4	2,1	0,7	3,8	(0,3)	(1,7)	(43,6)
Kacang lain	0,1	0,4	0,2	1,0	(0,1)	(0,6)	(61,2)
Subtotal	12,2	69,6	19,5	111,0	(7,3)	(41,4)	(37,3)
7. Gula							
Gula Pasir	3,4	19,2	10,1	57,3	(6,7)	(38,0)	(66,4)
Gula Merah	0,3	1,5	1,1	6,4	(0,9)	(4,9)	(76,1)
Subtotal	3,7	20,8	11,2	63,7	(7,6)	(42,9)	(67,4)
8. Sayur dan Buah							
Sayur	45,4	258,2	64,3	365,3	(18,8)	(107,1)	(29,3)
Buah	32,3	183,5	35,9	203,7	(3,6)	(20,3)	(10,0)
Subtotal	77,7	441,7	100,1	569,1	(22,4)	(127,4)	(22,4)
9. Lain-lain							
Minuman	27,3	155,4	29,2	166,1	(1,9)	(10,7)	(6,5)
Bumbu	3,1	17,5	3,9	22,0	(0,8)	(4,5)	(20,3)
Subtotal	30,4	172,9	33,1	188,1	(2,7)	(15,2)	(8,1)